

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON

TAHUN 2026

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data kepegawaian individu	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf l; b. UU No 20 Tahun 2020 Tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil e. PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; f. PP. No. 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai; b. Dapat menghambat proses penegakkan hukum; c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia; b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum dan mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama menjadi pegawai.
Dokumen pengelolaan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutase, pension, dan administrasi kepegawaian)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, i, dan j; b. UU No 20 Tahun 2020 Tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. PP. No. 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017.	Mengganggu proses pengambilan keputusan.	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja; c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang.	Sampai dengan terbitnya surat keputusan.

Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Data mengungkapkan rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
a. Arsip dinamis, aktif, dan inaktif, yang berisikan: - Dokumen keuangan; SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otoritasnya - Surat pencairan anggaran b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2).	a. Menghambat proses penegakan hukum; b. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit; c. Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.	a. Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses hukum; b. Melancarkan pelaksanaan kegiatan; c. Mendorong keberhasilan pembangunan.	Sampai dokumen teraudit.

Cirebon, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
Kota Cirebon



Dr. H. ING DAIMAN, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680822 199703 1 003